

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang biasanya juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL pada umumnya yang bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal yang besar dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.<sup>1</sup>

Dalam mempertahankan hidupnya masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup di dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.<sup>2</sup>

Para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dan menggunakan tempat-tempat usaha wajib memiliki izin dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pada kenyataan yang ada, para pedagang kaki lima selama ini banyak yang menggunakan trotoar atau pinggir

---

<sup>1</sup> Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. Hal. 1

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing: Yogyakarta, hlm. 28.

jalan untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Setiap para pedagang kaki lima mempunyai satu izin tempat usaha. Para pedagang kaki lima dilarang untuk mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan. Berdasarkan kondisi yang seperti ini diharapkan para pedagang kaki lima yang membuka tempat usaha dapat memperhatikan peraturan yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Penataan lalu lintas, berupa jalan raya, fasilitas pendukung dan manajemen lalu lintas menjadi tanggung jawab besar negara, negara memiliki peran dan kewenangan untuk bagaimana cara menciptakan kondisi lalu lintas yang mengutamakan keselamatan, keamanan, ketertiban lalu lintas, kelancaran berlalu lintas angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pedagang kaki lima hampir terdapat di seluruh kota besar dan kecil di Indonesia. Pertumbuhannya searah dengan langkanya kesempatan kerja di kota. Membengkaknya pertumbuhan penduduk dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta migrasi penduduk dari desa ke kota merupakan suatu fenomena yang menjadi salah satu faktor menjamurnya pedagang kaki lima saat ini.

Persoalan kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas selalu identik dengan permasalahan di masyarakat perkotaan, masih segar di ingatan kita pemberitaan nasional terkait relokasi pedagang kaki lima di daerah pusat

perdagangan di Tanah Abang Jakarta, keberadaan pedagang kaki lima yang memadati jalan kota dan juga fasilitas pejalan kaki, yang pada akhirnya membuat terganggunya fungsi lalu lintas, bukan hanya kemacetan bagi kendaraan bermotor, namun juga pejalan kaki terganggu untuk menikmati hak-hak publiknya. Bahkan sempat saking jengkelnya, pemerintahan daerah setempat mengancam akan mempidana para PKL pelanggar apabila masih membandel , tidak mau direlokasi sebagai upaya penertiban dan penegakan hukum.<sup>3</sup>

Fasilitas pejalan kaki sendiri berupa trotoar terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, definisi dari Trotoar di jelaskan yaitu tempat bagi pejalan kaki yang tak menggunakan kendaraan. Seperti yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 275 ayat (1) Undang-Undang No 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana bunyinya sebagai berikut:<sup>4</sup>

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”*

Masalah PKL di Kota Batu salah satunya yang berada di Alun-Alun Kota Batu ini berkaitan dengan Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Sulitnya mendapatkan pekerjaan menjadi faktor

---

<sup>3</sup> Kurnia Sari Aziza, *PKL Lecehkan Hukum Karena Tak Pernah di Pidana*, <https://megapolitan.kompas.com>.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

mengapa banyak masyarakat lebih memilih berjualan di pinggir jalan atau trotoar, karena di jalan lebih banyak orang melintas. Sehingga hal ini lah yang mendorong PKL berjualan di trotoar guna meningkatkan perekonomian mereka.

Pemerintah adalah lembaga yang mengatur tentang aturan - aturan yang ada di masyarakat dan peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Kebijakan salah satu wewenang Pemerintah untuk membuat suatu aturan yang berpihak kepada masyarakat dengan tujuan untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Terlaksananya suatu perubahan dalam masyarakat tentunya harus dibuat suatu kebijakan yang mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya harus memberikan suatu perubahan dalam peningkatan ketentraman di masyarakat. Hal ini dilihat dari sisi ketertiban dan kenyamanan lingkungan suatu daerah sangat penting untuk dibuat aturan yang tegas. Dengan berkembang pesatnya pembangunan dan penambahan penduduk di suatu daerah menyebabkan aturan - aturan di dalam masyarakat harus dapat ditangani oleh Pemerintah. Adapun peraturan Pemerintah Daerah merupakan suatu kebijakan yang harus di implementasikan yaitu agar berjalannya aturan tersebut sesuai harapan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa:

*“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan,*

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau dengan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)''.*<sup>5</sup>

Pasal 63 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja berjualan di tempat yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan manfaat jalan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau dengan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa :

*“Pedagang Kaki Lima yaitu pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.*<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum seperti trotoar jalan yang bersifat sementara/tidak menetap.

Kehadiran PKL disatu menimbulkan dampak positif bagi warga negara, namun disisi lain juga mengakibatkan permasalahan. Dampak positif dari PKL yakni PKL merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Sedangkan dampak

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>6</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 Perpres Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

negatif kehadiran PKL seringkali beririsan dengan kepentingan umum dan ketertiban umum.

Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti juga menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu. Sedangkan penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.<sup>7</sup> Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 4 Huruf (a) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Banyaknya orang yang memilih menjadi PKL. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:<sup>8</sup>

- 1) Kesulitan ekonomi;
- 2) Sempitnya lapangan pekerjaan; dan
- 3) Urbanisasi.

Berdasarkan Pasal 4 Huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban PKL dengan tegas telah mengatur permasalahan ketertiban umum dalam menyebutkan bahwa :

*Setiap kegiatan usaha PKL dilarang :<sup>9</sup>*

---

<sup>7</sup> Yu Un Oppusunggu, 2008, *Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum*, "Law, Society & Development", Vol. II, No. 3, (Agustus – November).

<sup>8</sup> Gilang Permadi, 2007, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Yudistira: Jakarta, hlm. 7

<sup>9</sup> Pasal 4 Huruf (a) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

*a) Melakukan kegiatan usahanya di jalan protocol, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum, kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;*

Pasal 4 Huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa setiap orang atau badan yaitu seperti pedagang kaki lima dilarang menggunakan jalan atau trotoar tidak sesuai fungsinya seperti berjualan sembarangan di area yang dilarang.

Dalam kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh PKL secara sengaja maupun tidak. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus dapat diimplementasikan pada masyarakat sehingga ketertiban umum dapat terlaksana dengan baik. Bila dilihat tentang masalah ketertiban umum masih belum tertata dengan baik sebab masih banyak ditemukan masyarakat tidak mentaati aturan tersebut.

Salah satu kinerja Pemerintah adalah melakukan penataan terhadap PKL berupa relokasi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Bahkan di beberapa kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung seringkali diwarnai bentrokan antara Satpol PP selaku aparat yang berwenang menjaga ketertiban dengan masyarakat serta PKL, seperti penataan yang dilakukan di Kota Batu masih saja terdapat PKL yang berjualan di trotoar jalan Alun-Alun Kota Batu.

Pada tanggal 17 Maret 2017 lalu, Satpol PP Pemkot Batu menindak tegas 24 PKL Alun-Alun Kota Batu. Mereka menghadapi sidang tindak pidana ringan (Tipiring), ke 24 PKL Alun-alun tersebut terjaring razia Satpol PP karena nekat berjualan ditempat larangan jualan PKL atau di fasilitas umum

Kota Batu dan mereka telah melanggar Perda Nomor 5 tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban PKL atau yang melakukan kegiatan usaha di jalan protokol, trotoar, jalur hijau dan fasilitas umum. Dalam sidang tipiring tersebut mereka dijatuhkan vonis denda Rp 100 ribu hingga Rp 150 Ribu. Para PKL dalam sidang tipiring akhirnya mengakui kesalahan berjualan di tempat larangan dan mereka bersedia membayar vonis denda yang dijatuhkan hakim dalam sidang tipiring.<sup>10</sup>

Meskipun terdapat Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang terbit pada Tahun 2005 hingga saat ini telah memasuki Tahun 2019, bisa dilihat sudah beberapa tahun dari Peraturan itu terbit tetapi problematika terhadap Penataan dan Penertiban PKL masih saja terjadi.

Sangat banyak PKL yang menghiasi Kota Batu, dengan modal gerobak, mereka menempati keramaian kota, ada yang mendirikan tenda-tenda untuk menjual dagangannya dan ada pula yang hanya menggelar dagangannya dipinggir jalan atau trotoar-trotoar yang dapat dengan mudah dibongkar. Tindakan penertiban PKL di Kota Batu didasarkan atas penerapan Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang menyatakan setiap kegiatan usaha PKL dilarang:

- a) *Melakukan kegiatan usahanya di jalan protocol, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum, kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;*

---

<sup>10</sup>Ary Punka Aji, PKL Alun-Alun Kota Batu jalani sidang Tipiring, <http://website.batukota.go.id>. Di akses tanggal 24 Oktober 2018.



Perkembangan PKL dari waktu ke waktu semakin pesat, karena pedagang jenis ini dengan lebih mudah dapat dijumpai konsumen dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap, sehingga konsumen dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan akan barang-barang eceran dan konsumen tidak perlu sulit untuk mencari barang yang mereka inginkan. Situasi tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal sebagai Pedagang Kaki Lima, misalnya dengan berjualan makanan dan minuman dengan mengikuti model dan apa yang sedang ramai disukai oleh masyarakat saat ini.

PKL selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipadang profit misalkan pusat kota, alun-alun, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang mempunyai nilai berpontensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa mempedulikan hal-hal lain. Bahkan PKL sering dituding mengganggu ketertiban, sehingga keberadaannya mengundang stigma negatif di mata masyarakat.<sup>11</sup>

Dibalik kehadiran para PKL tersebut ternyata dapat memberikan manfaat yang positif dan manfaat yang kurang menguntungkan. Manfaat yang positif mungkin dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi rendah karena mereka dapat memperoleh barang dengan harga yang terjangkau.

Disisi lain fenomena PKL ini juga menimbulkan akibat negatif terutama bagi Pemerintah Kota Batu selaku pembuat dan penentu kebijakan.

---

<sup>11</sup> Hanif, Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo : Jakarta, hlm 4.

Dalam perspektif Pemkot, Para PKL ini seringkali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan jadi tercemar, pemicu terjadinya kerawanan sosial, serta salah satu penyebab suasana kota menjadi kacau atau tidak teratur selain itu, keberadaan para PKL ini juga sering dianggap sebagai salah satu penghambat rencana Pemerintah Kota dalam pengembangan dan perluasan wilayah. Fenomena PKL dianggap mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batu, walaupun Kota Batu adalah Kota Pariwisata yang sudah terkenal secara Nasional.<sup>12</sup>

Tujuannya adalah bahwa agar dapat berkembang pedagang kaki lima perlu adanya pembinaan, disamping itu mereka juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Batu sebagai kota tujuan wisata yang aman, tertib, indah, dan bersih.<sup>13</sup>

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

---

<sup>12</sup> *Analisis Faktpr-faktor yang mempengaruhi pendapatan Pedagang Kaki Lima*, <http://jurnalskripsi.com>. Diakses tanggal 25 Oktober 2018.

<sup>13</sup> Lihat penjelasan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Batu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan penelitian pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima?
2. Kendala dalam Penegakan Hukum atas Pelanggaran larangan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui dalam Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

a) Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

b) Bagi Masyarakat

Dapat digunakan untuk memberikan informasi khususnya untuk Pedagang Kaki Lima terkait penerapan Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima, guna untuk menciptakan lingkungan yang bersih nyaman dan terciptanya ketertiban umum,

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima guna meningkatkan penegakan hukum bagi pelanggaran larangan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana juga pada bidang Hukum lainnya mengenai Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Menurut Muhidin Sirat, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya, Kesimpulannya bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian dengan menggunakan cara atau proses tertentu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan antara lain sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan mengemukakan hukum yang hidup di masyarakat dengan menggunakan data primer berupa narasumber atau responden yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Batu untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan

---

<sup>14</sup> Ibnudin, *Metode Penelitian menurut para Ahli*, <https://ibnudin.net/metode-penelitian-metodologi-penelitian/>. Diakses tanggal 25 Oktober 2018.

Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Sedangkan secara sosiologis yaitu menghubungkan antara kenyataan atau fakta di lapangan dengan aspek hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Batu khususnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan PKL di kawasan Alun-alun Kota Batu dikarenakan Kota Batu sebagai kota wisata mestinya didukung dengan penataan yang baik dan dipatuhi akan tetapi masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKL seperti kota-kota lain.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas berkaitan dengan judul tugas akhir penulis mengenai Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu).

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan wawancara atau menggali informasi pada responden serta data sekunder yang merupakan dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan guna mendukung

pernyataan responden. Dalam pencapaian data yang relevan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 3.1 Data Primer

Sumber Data Primer diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja dan PKL di Kota Batu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini didapat dengan melakukan wawancara dengan responden secara langsung guna memperoleh keterangan dan informasi terkait permasalahan Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu).

### 3.2 Data Sekunder

Sumber Data Sekunder digunakan sebagai data pelengkap yang mendukung sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literature, dokumen-dokumen, tulisan, buku, arsip, majalah, penelitian terdahulu maupun peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 4. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti adalah sebagai berikut :

a) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan secara langsung oleh penulis pada objek penelitian tentang Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi melalui Tanya jawab serta diskusi kepada pihak yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti yaitu :

- 1) Supriyanto sebagai Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu.
- 2) Pedagang Kaki Lima yang berjualan di jalan sekitar Kota Batu.

Penulis mengambil secara langsung 10 responden, yaitu :

1. Triyono, penjual Cilok
2. Firdaus, penjual Tahu Campur
3. Yunus, penjual Sempol
4. Vicky, penjual Sate Gurita
5. Roni, penjual Durian
6. Triyas, penjual Telur Gulung
7. Adim, penjual Pentol Cilok
8. Okta, penjual Juice Buah
9. Iyus, penjual Batagor



## 10. Soleh, penjual Jagung Susu Rebus

### c) Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung dari literatur, buku, yang berhubungan dengan penulisan ini dan menjadikan hal tersebut menjadi landasan teoritis.

### d) Internet

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet dan website untuk melengkapi bahan hukum dalam penulisan ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan yang ada pada prosoposal penelitian ini, penulis memberikan gambaran umum serta membaginya pada beberapa bagian BAB dengan sistematika yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan definisi dan teori teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain: teori

penegakan hukum, pelanggaran, konsep tentang ketertiban umum dan tinjauan umum Pedagang Kaki Lima.

### **BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan, menguraikan dan menganalisa terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima dan Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum atas Pelanggaran larangan berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 4 Huruf (a) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini terdapat kesimpulan serta saran yang menjadi bab terakhir dari penelitian ini, kesimpulan pada bagian ini menjadi kesimpulan akhir yang berisi pemikiran, pendapat serta solusi atas penelitian yang dilakukan. Saran dan hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.